

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perusahaan merupakan salah satu pelaku penting dalam perekonomian masyarakat luas. Saat ini perusahaan dituntut untuk turut serta dalam pembangunan keberlanjutan, pembangunan keberlanjutan sendiri merupakan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep keberlanjutan mengacu pada kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya mereka secara efektif dan efisien dari waktu ke waktu dan juga limbah yang dihasilkan sengaja dikurangi dan lebih baiknya lagi adalah dengan mengimplementasikan limbah tersebut menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Dalam hal ini tidak jauh dari tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial keberlanjutan. Pendekatan keberlanjutan yang diadopsi oleh organisasi apapun dan dimanapun tidak bisa terlepas dari ke dalam tiga dimensi itu.

Dengan adanya perkembangan zaman, anggapan bahwa perusahaan hanya berfokus untuk mencari laba yang maksimal telah berkurang. Karena untuk saat ini tujuan bisnis selain untuk mencari keuntungan (*profit*) juga diharapkan dapat bertanggungjawab terhadap masyarakat (*people*) dan bumi (*planet*) atau yang dikenal dengan istilah *triple bottom line*. Maksudnya adalah kegiatan bisnis tidak hanya difokuskan untuk mencari keuntungan saja tetapi juga diharapkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan juga turut berkontribusi dalam kepedulian sosial dan lingkungan.

Dalam konteks meningkatnya kepedulian sosial dan lingkungan, peran perusahaan besar dan perusahaan kecil dalam mendorong keberlanjutan telah menarik perhatian beberapa tahun terakhir. Debat akademik dan riset ekonomi publik mempertanyakan tanggung jawab perusahaan yang semakin luas di dunia yang seperti sekarang ini sudah saling terhubung satu dengan yang lainnya. Perusahaan perusahaan besar menjadi aktor politik global penting dengan kekuatan besar mereka tetapi juga mempunyai tanggungjawab yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74. Dalam UU tersebut mengandung definisi dan sanksi dari pelaksanaan tanggungjawab lingkungan dan sosial, tetapi didalamnya tidak terdapat mengenai tata cara pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Undang undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perseroan yang usahanya bergerak dalam bidang penggunaan sumber daya alam memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan. Tanggungjawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan sebagai biaya perusahaan.

Informasi mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diungkapkan dalam *Sustainability report*. *Sustainability report* merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dikonseptualisasikan sebagai dokumen untuk menginformasikan kepada semua pemangku kepentingan mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kinerja perusahaan sehubungan dengan periode waktu tertentu. Istilah pelaporan tanggung jawab sosial mengacu pada pengungkapan yang luas dan beragam, termasuk praktik perburuhan, hubungan dengan pemasok, interaksi dengan pelanggan, kegiatan komunitas, kontribusi

amal, dan efek dari produk perusahaan kepada kesehatan dan keselamatan konsumen. Pengungkapan ini mewakili komunikasi manajemen dengan para pemangku kepentingan pada masalah yang melebihi informasi yang diungkapkan laba perusahaan sendiri yang hanya menyediakan informasi tentang caranya keuntungan dihasilkan. *Sustainability report* mempunyai acuan terhadap standar internasional *Global Reporting Initiative* (GRI).

*Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah organisasi terkemuka internasional di bidang keberlanjutan. Saat ini GRI menyediakan pedoman standar laporan berkelanjutan versi Standar *Guidelines*. Kerangka kerja GRI untuk pelaporan keberlanjutan dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan melaporkan informasi yang lebih luas, jelas dan juga dapat dibandingkan. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2000 GI, kemudian menyusul perubahan pada tahun 2002 menjadi *Guidelines 2* (G2), mengalami perubahan lagi pada tahun 2006 menjadi G3 dan untuk tahun 2013 G4. Sehingga kerangka pelaporan GRI terbaru adalah standar GRI, diluncurkan pada tahun 2016.

Di berbagai Negara maju di kawasan Eropa seperti Swedia, Finlandia, Belanda dan Jerman serta Negara Asia seperti Jepang, dimana Negara Negara tersebut telah mewajibkan setiap perusahaannya untuk membuat laporan keberlanjutan. Tidak heran jika Negara tersebut mendapat nilai dan peringkat yang tinggi dalam *Environmental Performance Index* (EPI). Bahkan menurut survey dari *Value Champion* Jepang termasuk dalam Negara yang paling ramah lingkungan di tahun 2018. Hal ini berbanding dengan Indonesia yang menempati urutan ke 133 dari 180 negara dalam EPI.

Berbeda dengan di Indonesia sendiri pengungkapan *sustainability report* masih bersifat sukarela dan tidak ada aturan baku yang mewajibkan seperti halnya dengan *financial reporting*. Walaupun masih bersifat sukarela, namun minat perusahaan untuk mengungkapkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2017, 9 % perusahaan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia telah membuat laporan keberlanjutan dan juga mengungkapkannya sesuai dengan standar yang diterapkan GRI ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), 2017). Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Global Reporting* selama tiga periode dapat dilihat dalam tabel.

**Tabel 1. Jumlah Perusahaan Yang Mengungkapkan *Sustainability report* di Indonesia**

Sektor	2015	2016	2017
Non-Keuangan	9%	10%	12%
Keuangan	5%	5%	5%

Sumber: *Global Reporting Index*, 2018

Berdasarkan data diatas jumlah perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* di Indonesia masih terbatas. Dari total perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 464 hanya 40 perusahaan non keuangan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan pada tahun 2017. *Sustainability report* sendiri dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan jumlah perusahaan yang mempublikasikan, namun untuk tingkat peningkatannya masih tergolong rendah, seperti dalam tabel 1. jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hanya berjumlah 48 perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan, ini hanya 14% dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2016 hanya

terdapat 51 perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan dari total 539 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau hanya sekitar 15% , dari tahun 2015 ke 2016 hanya mengalami peningkatan kurang lebih 1%. Untuk tahun 2017 sendiri jumlah perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan ada sekitar 57 perusahaan dari total 464 perusahaan yang terdadar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Keseluruhan jumlah pengungkapan di Indonesia dari tahun 2015-2017 sudah ada 120 pengungkapan, dimana hanya 15% dari total keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari 120 pengungkapan tersebut meliputi perusahaan yang terdaftar di BEI maupun yang tidak terdaftar di BEI seperti PT PLN, PT KAI, PT Pupuk Kujang, SKK Migas, PT Pelabuhan II, PT Badak NGL Indonesia dan beberapa anak perusahaan PT Pertamina lainnya. Adapun dari perusahaan swasta antara lain PT Sunrise Bumi, PT Elegan Textile, PT Sinar Mas Land, dan PT Indo Liberty textile.

Walaupun perkembangan *sustainability report* di Indonesia masih sedikit namun hal ini menunjukkan tren yang positif, dimana tiap tahun jumlahnya selalu meningkat, mengingat *sustainability report* sendiri merupakan laporan yang tidak diwajibkan. Dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, Indonesia dalam pelaporan keberlanjutan sangat baik setelah Negara Thailand. Dibandingkan dengan Negara Asia Tenggara lainnya Thailand dan Indonesia menjadi Negara yang membuat pelaporan berkelanjutan terbanyak. Berikut adalah tabel perbandingan jumlah perusahaan di Asia Tenggara yang melakukan pembuatan *Sustainability report* dan *disloure* ke *Global Reporting Initiative*. Data yang ditampilkan merupakan data per Februari 2016.

**Tabel 2. Perbandingan organisasi untuk Asia Tenggara Yang Mempublikasikan *Sustainability report***

<b>Negara</b>	<b>Total Pengungkapan</b>	<b>Persentase</b>
Kamboja		
Indonesia	85	25%
Malaysia	59	18%
Filipina	30	9%
Singapura	54	16%
Thailand	97	29%
Vietnam	12	2%
<b>Jumlah</b>	<b>337</b>	<b>100%</b>

*Sumber : GRI*

Penerbitan Laporan keberlanjutan di Indonesia, hampir sebagian besar berdasarkan indeks pengungkapan *Global Reporting Initiative (GRI)*, dimana indeks GRI saat ini yang baru adalah GRI standar. Sampai dengan akhir tahun 2016 ada sebanyak 49 perusahaan listing di BEI telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Sebanyak 12 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Selain perusahaan listing, perusahaan non listing juga tidak kalah dalam menerbitkan laporan keberlanjutan. Antusiasme yang cukup tinggi dari penerbitan laporan keberlanjutan tersebut menunjukkan bahwa laporan tersebut merupakan laporan yang penting untuk diterbitkan terutama dalam hal untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik.

Praktik dan pengungkapan *sustainability report* merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep dan mekanisme *Good Corporate Governance*

(GCG) yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholder* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Abdul Aziz, 2014). Karena sebagaimana dijelaskan *Sustainability report* memberikan kontribusi informasi bagi *stakeholder*-nya dalam pengambilan keputusan. Misalnya untuk pemegang saham apakah akan menjual sahamnya atau akan menanamkan di perusahaan tersebut., untuk karyawan dengan adanya laporan keberlanjutan apakah memilih untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut atau tidak, untuk konsumen laporan keberlanjutan juga memiliki informasi untuk membeli produk atau jasa dari perusahaan tersebut atau tidak.

Bagi perusahaan sendiri, *sustainability report* dapat memberikan banyak manfaat. Perusahaan memberikan informasi *sustainability report* kepada karyawan, sehingga *interest* dan semangat kerja karyawan semakin meningkat. *Sustainability* yang diberikan kepada pemerintah mampu memberikan suatu kepercayaan sehingga perusahaan akan memperoleh lisensi untuk menjalankan usahanya. Selain itu *sustainability report* juga akan meningkatkan image perusahaan dan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan sehingga *stakeholder* termasuk investor tetap akan menjaga hubungan baiknya dengan perusahaan (Lasmaria, 2014)

Laporan keberlanjutan merupakan elemen instrinstik dari pelaporan integrasi, dan perkembangan yang lebih baru yang menggabungkan analisis kinerja keuangan dan non keuangan baik informasi kuantitatif maupun informasi yang kualitatif. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perusahaan yang turut serta

dalam pembangunan keberlanjutan adalah selalu memperhatikan lingkungan, memperhatikan dampak apa saja yang dihasilkan karena adanya bisnis tersebut, agar nantinya lebih diperhatikan lagi. Selain itu dari sisi ekonomi juga dengan perusahaan turut serta dalam pembangunan keberlanjutan dapat meningkatkan nilai lebih di mata investor.

Dalam penyusunan *sustainability report* sendiri, harapan dan keinginan keinginan para *stakeholder* adalah titik acuan utama bagi banyak keputusan yang terlibat, seperti ruang lingkup, batasan serta aplikasi indikator dan jaminan (GRI, 2017). Oleh karena itu, beberapa pedoman internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Institute of Sosial and Ethical Accountability* mendudukan *stakeholder engagement* sebagai sarana utama untuk mengembangkan struktur *sustainability report* (Owen, dkk, 2001). Karena *stakeholder engagement* menjadi kritikal terhadap *sustainability report* maka dalam hal ini *stakeholder engagement* memfasilitasi pengidentifikasian dan pengertian isu isu, keperdulian kebutuhan dan ekspektasi dari para pemangku kepentingan.

Oleh karena hal itu perusahaan besar di satu sisi mempertimbangkan pendapat para pemangku kepentingan mereka sambil mendefinisikan strategi mereka dan di sisi lain juga mengungkapkan informasi yang relevan tentang kemampuan mereka untuk berkontribusi pada keberlanjutan sambil memberikan nilai bagi semua pemangku kepentingan mereka. Karena pada dasarnya kekuatan pemangku kepentingan adalah fungsi dari sumber daya perusahaan yang penting untuk di kontrol mereka. Seperti dijelaskan dalam teori ketergantungan terhadap sumber daya menunjukkan bahwa kekuasaan timbul dari pihak pihak yang



mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi, sehingga menciptakan perbedaan kekuasaan diantara para pemangku kepentingan.

Perusahaan selain menerapkan CSR yang baik ke dalam para *stakeholder* maupun ke masyarakat, juga dengan adanya perkembangan zaman dituntut untuk melaporkan keberlanjutan dari apa yang mereka lakukan sebagai bentuk tanggungjawab mereka, yaitu salah satunya dengan mengungkapkan *sustainability report*. Tentunya perusahaan yang dengan sukarela mempublikasikan laporan keberlanjutan akan mempunyai nilai lebih di mata *stakeholder*, selain itu juga dapat meningkatkan nilai investasi dan meningkatkan laba yang nantinya akan dihasilkan perusahaan. Karena perusahaan tidak hanya memfokuskan diri pada pencapaian laba yang tinggi tanpa memperhatikan lingkungan dan kehidupan sosial tetapi juga mereka turut andil dalam kegiatan tanggung jawab sosial tersebut.

Di Indonesia sendiri untuk perkembangan pengungkapan tanggungjawab sosial sendiri masih terus berkembang, pada tahun 2009 PT Trubaindo Coal Mining menghadapi ancaman penghentian aktivitas perusahaan oleh warga hal itu dikarenakan dalam pelaporan tanggungjawab mereka menyatakan bahwa mengganti lahan warga Bentian Besar Kaltim sebesar Rp 40 juta per hektar namun dalam hal kenyataan di lapangan hanya menggantinya sebesar Rp 20 juta per hektar. Pada tanggal 26 Januari 2012 yang lalu LSM Merah Putih dan Cagar Tuban melakukan unjuk rasa ke kantor PT Holcim di Jl. Basuki Rahmad Kabupaten Tuban untuk menolak rencana pembangunan pabrik yang dikhawatirkan dapat menambah daftar kerusakan yang terjadi di wilayah Tuban. Dalam industri rokok juga di Indonesia bentuk tanggungjawab sosialnya hanya

bersifat kegiatan filantropi yaitu melalui klub olahraga, pemberian beasiswa, dan lain lain. Mereka hanya berfokus untuk menyogok masyarakat dengan cara pemberian beasiswa dengan mengabaikan tanggungjawab yang lebih bersifat fundamental yang jauh lebih diharapkan oleh masyarakat luas. Bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang terjadi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia yang memberikan dana sebagai bentuk CSR kepada masyarakat Sulawesi Tengah sebesar 11,7 miliar.

Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) sepanjang tahun 2017 ada sekitar 302 konflik lingkungan hidup dan agraria. Seperti tergambar dalam film dokumenter “*sexy killer*” yang baru baru ini rilis sebelum mendekati Pemilu. Dimana dalam film dokumenter tersebut menggambarkan perjuangan masyarakat di Kalimantan untuk mendapat air bersih setelah ekspansi perusahaan tambang atau perjuangan nelayan dan petani di Batang Jawa Tengah yang aktivitasnya terganggu oleh keberadaan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PTLU) Batang. Belum lagi ditambah dengan timbulnya penyakit yang disebabkan akibat populasi udara yang dihasilkan oleh PLTU tersebut. Selain itu juga kasus lingkungan yang muncul pada tahun 2018 adalah PT Freeport diduga turut serta dalam kerusakan lingkungan setara dengan 185 Trilyun, dalam surat yang dikirimkan CERI ke KLHK disebutkan bahwa Freeport diduga mencemari sungai Aghawagon dengan limbah hasil pertambangan atau tailing seluas 230 kilometer persegi. Dimana sebelumnya CERI menuding tailing yang berjumlah 230 juta metric ton per hari menimbulkan perubahan ekosistem di sungai, hutan, eustaria, dan sudah sampai kawasan laut. Melalui perhitungan yang telah di lakukan oleh

Institut Pertanian Bogor dan LAPAN, jasa ekosistem yang dikorbankan adalah US\$ 13,5 juta atau setara dengan 185 trilyun.

Penelitian *Stakeholder engagement* dan Laporan Pertanggungjawaban sosial telah dilakukan oleh Lodhia, K Smith (2013) dalam penelitian Lodhia, K Smith (2013) dijelaskan bahwa *stakeholder engagement* merupakan komponen kritical dalam pengembangan *sustainability report*. Penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel perusahaan publik yang ada di Australia tersebut menyebutkan bahwa komunitas merupakan pemangku kepentingan kunci dalam perusahaan-perusahaan sektor publik di Australia, Forum online menjadi media yang paling efektif untuk melakukan *stakeholder engagement* bagi perusahaan-perusahaan sektor publik di Australia. Selain itu dengan adanya peraturan nasional untuk menggalakan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam isu-isu *sustainability*.

Lebih jauh penelitian yang dilakukan oleh Kaur dan Lodhia (2018) mengidentifikasi pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam sebuah proses akuntansi dan pelaporan keberlanjutan, pengembangan rencana strategis dan indikator keberlanjutan, pengukuran kinerja keberlanjutan dan penyusunan laporan keberlanjutan. Standar Internasional seperti *Global Reporting Initiative and Accountability* telah menandakan peran keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan laporan keberlanjutan. Namun hanya terdapat sedikit penelitian yang menunjukkan apakah organisasi terlibat dengan pemangku kepentingan mereka untuk tujuan pelaporan. Namun dalam hasil penelitian Kaur dan Lodhia (2018) menunjukkan bahwa adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaporan keberlanjutan di dewan lokal Australia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara pengaruh *stakeholder engagement* pada perusahaan yang menerbitkan *sustainability report*. *Stakeholder* yang mewakili pihak pemegang saham yaitu variabel Kepemilikan saham asing dan Kepemilikan saham Institusional, yang mewakili pihak pemerintah yaitu variabel Agresivitas Pajak, yang mewakili pihak kreditur yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan dari pihak masyarakat dan publik.

Acep Edison (2017) meneliti Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014. Dalam penelitian ini menggunakan Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Institusional. Perusahaan yang mempunyai Kepemilikan Saham Asing dan Kepemilikan Saham Institusional akan membuat para pemegang tersebut semakin kuat posisinya di perusahaan., karena Kepemilikan saham asing dan kepemilikan saham dari berbagai institusi akan mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Jaya, IGKAA, et al (2018) meneliti hubungan antara agresivitas pajak terhadap pengungkapan informasi *sustainability report*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Sustainability report* dan variabel independennya adalah agresivitas pajak. Dalam penelitian ini juga akan menggunakan variabel agresivitas pajak hubungannya dengan pengungkapan *sustainability report*. Semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan maka akan semakin rendah melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang bertanggungjawab sosial

berdasarkan teori *stakeholder* akan mempengaruhi penghindaran pajak (Watson, 2012).

Syahrifa (2017) menguji variabel *profitabilitas*, likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, jumlah rapat dewan direksi, jumlah rapat komite audit, dan jumlah anggota dewan komisaris terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Penelitian ini menggunakan variabel *leverage*. Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi akan menambah keinginan perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan mengungkapkan laba sekarang lebih tinggi. Para *stakeholder* akan percaya kepada perusahaan yang mengungkapkan laba yang tinggi. Perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi akan memangkas biaya biaya, termasuk biaya untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya.

Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar kecilnya perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tuntutan terhadap keterbukaan informasi dibandingkan perusahaan yang kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar merupakan perusahaan yang banyak disoroti oleh para *stakeholder*. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi *stakeholder* dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusumawati (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan indikator yang mewakili *stakeholder engagement* diantaranya Kepemilikan saham asing dan

Kepemilikan saham Institusional mewakili *stakeholder* dari sisi pemegang saham, unuk pemerintah menggunakan indikator Agresivitas Pajak, *Leverage* dari sisi kreditur dan dari sisi masyarakat dan publik diwakili oleh Ukuran Perusahaan. Objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode pelaporan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Tahun 2017-2018. Jika penelitian sebelumnya untuk mengetahui pengaruh indikator *stakeholder engagement* terhadap pengungkapan *Sustainability report* berdasarkan standar GRI G4 maka dalam penelitian ini menggunakan standar terbaru yang telah diberlakukan yaitu GRI Standar.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, pengungkapan *sustainability report* mampu memberikan manfaat-manfaat positif bagi para *stakeholder*, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Stakeholder Engagement Terhadap Pengungkapan Sustainability report berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Standar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Saham Asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI standar ?
2. Apakah Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI standar ?
3. Apakah Agrsivitas Pajak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI standar ?

4. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI standar ?
5. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI standar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah di ungkapkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif Kepemilikan Saham Asing terhadap pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI standar.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Kepemilikan Saham Institusional terhadap pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI standar
3. Untuk mengetahui pengaruh positif agresivitas pajak terhadap pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI standar
4. Untuk mengetahui pengaruh negatif *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI standar
5. Untuk mengetahui pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report* berdasarkan GRI standar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide gagasan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan *Sustainability report* ,

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca dan sebagai salah satu bahan referensi dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi pengetahuan tentang manfaat publikasi *sustainability report* dalam upaya melakukan pertanggungjawaban ekonomi, sosial, lingkungan perusahaan kepada *stakeholder*

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi pertimbangan agar dapat berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kemampuan *sustainability report* yang baik.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai analisis untuk menentukan kebijakan dalam membuat sistem *sustainability report* yang baik.